



Judul : Tambahan TKD disetujui, DPR: dukungan fiskal percepat rehabilitasi
Tanggal : Sabtu, 21 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tambahan TKD Disetujui DPR: Dukungan Fiskal Percepat Rehabilitasi

SENAYAN mengapresiasi keputusan Pemerintah menambah anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp 10,56 triliun. Kebijakan ini akan mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Indrajaya menilai, penambahan anggaran itu mencerminkan keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap daerah yang masih menghadapi dampak serius pascabencana. Dukungan fiskal bakal jadi faktor penentu keberhasilan rehabilitasi infrastruktur, layanan publik, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Tanpa dukungan anggaran memadai, daerah sulit memulihkan fungsi pelayanan dasar. Itu berpotensi memperpanjang beban sosial dan ekonomi masyarakat terdampak," ujar Indrajaya, dalam keterangannya Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, legislator Fraksi PKB itu menyebut, percepatan pencairan jadi faktor krusial agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan di lapangan. Pasalnya, hambatan administratif sering kali menjadi persoalan klasik dalam penyaluran dana pusat ke daerah.

"Kami berharap pencairan TKD bisa dilakukan secepatnya. Daerah membutuhkan dukungan riil agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terhambat secara administratif," tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran anggaran akan berdampak langsung pada terham-

batnya perbaikan fasilitas publik di berbagai daerah. Akibatnya, aktivitas sosial, pendidikan, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat makin sulit kembali normal seperti semula.

Dia memastikan, Komisi II DPR akan menjalankan fungsi secara maksimal. Ini penting agar penggunaan anggaran tetap berada pada jalur prioritas yang telah ditetapkan. "Komisi II akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan TKD ini agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," katanya.

Sejalan dengan itu, DPR melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana juga telah menyepakati tambahan anggaran TKD. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut, dukungan anggaran lintas sektor jadi fokus utama pembahasan penanganan bencana. Skema TKD dan penambahan anggaran kementerian akan saling melengkapi.

Saan menjelaskan, pihaknya juga menyepakati realokasi anggaran dari pos lain untuk memenuhi kebutuhan mendasak. Langkah itu strategis agar pembangunan kembali infrastruktur tidak menunggu siklus anggaran berikutnya.

"Satuan Tugas menyetujui dana tanggap penyaluran diambil dari pos lain untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan fasilitas sosial," jelasnya.

Pihaknya juga menyoroti percepatan renovasi rumah tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Pemulihan sektor kesehatan jadi prioritas agar pelayanan masyarakat segera kembali optimal. ■ PYB